Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik

Implementation of Regulation of Minister of Agriculture Number 32 Year 2011 on Management and Public Information Service

Dhani Handoko*

*Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan, Indonesia

Corresponding author: E-mail: ghanimailbox@gmail.com

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 32 Tahun 2011 bertujuan untuk mewujudkan komunikasi yang harmonis antara penyedia informasi dengan pemohon dan pengguna informasi pertanian serta pengintegrasian antar penyedia informasi pertanian kepada publik. Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan (STPP Medan) yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Pusat di lingkungan Kementerian Pertanian yang ada di daerah berkewajiban untuk mengaplikasikan Permentan tersebut dalam bentuk pelayanan informasi publik. Apakah implementasi pelayanan informasi publik di STPP Medan sudah berjalan dengan efektif dengan ketentuan yang telah ditetapkan melalui Permentan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung oleh data primer berupa hasil wawancara dengan narasumber terkait dan data sekunder yang merupakan hasil telaah dokumen. Model implementasi kebijakan George Edwards III yang digunakan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa faktor komunikasi baik dari segi transmisi, kejelasan dan konsistensi, sumber-sumber, kecenderungan dan struktur birokrasi sangat berpengaruh sekali terhadap berjalannya implementasi suatu program kebijakan khususnya dalam pelayanan informasi publik di STPP Medan. Hasil penelitian menyimpulkan implementasi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 32 Tahun 2011 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian pada Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan belum berjalan dengan efektif.

Kata Kunci : Implementasi, Informasi Publik, STPP Medan

Abstract

Regulation of Minister of Agriculture (Permentan) No. 32 Year 2011. The Permentan Aims to realize harmonious communication between information providers with applicants and users of agricultural information as well as integration between agricultural information providers to the public. Medan Agricultural Extension College (STPP Medan) which is the Central Technical Implementation Unit within the Ministry of Agriculture in the region is obliged to apply the Permentan in the form of public information service. Is the implementation of public information services in STPP Medan has been running effectively with the provisions that have been established through the Permentan. This study uses a qualitative approach supported by primary data in the form of interviews with relevant sources and secondary data which is the result of document review. George Edwards III's policy implementation model used in this study shows that communication factors in terms of transmission, clarity and consistency, sources, trends and bureaucratic structures are very influential on the implementation of a policy program, especially in public information services at STPP Medan. The result of the research concludes the implementation of Regulation of Minister of Agriculture (Permentan) Number 32 Year 2011 concerning management and public information service in Ministry of Agriculture at Medan Agricultural Extension College has not run effectively yet.

Keywords: Implementation, Public Information, STPP Medan

How to Cite: Handoko, D., (2016), Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik, *Jurnal Administrasi Publik*, 6 (2): 147-159.

PENDAHULUAN

Dengan telah diterbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2008 dan mulai berlaku dua tahun kemudian setelah disahkan pada tahun 2010, maka tuntutan keterbukaan dalam memperoleh informasi di Indonesia semakin mendesak. Keterbukaan informasi publik berkeinginan menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat pada setiap proses kebijakan publik dalam rangka *Open Government Indonesia*.

Sejak digaungkannya undang-undang keterbukaan informasi publik Nomor 14 Tahun 2008 tersebut, hampir semua badan publik baik itu lembaga, kementerian, instansi pemerintahan dan bahkan organisasi/ swasta berusaha untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik di lingkungannya masing-masing dalam berbagai bentuk pelayanan informasi publik. Apakah pelayanan informasi yang diberikan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan pelayanan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan? Beberapa laporan badan publik dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu terkait dengan pelayanan informasi di sejumlah badan publik menunjukkan bahwa pelayanan informasi publik belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Walaupun pelayanan informasi tetap diberikan tetapi masih banyak mekanisme pelayanan tersebut yang belum mengacu pada ketentuan standar pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik itu sendiri. Banyak faktor yang menjadi kendala dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi di badan publik tersebut. Kendala internal dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik adalah penyediaan informasi bergantung pada *supply*

data dan satuan kerja sehingga waktu yang diperlukan menjadi sangat minim (Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik pada Kemenkominfo Tahun 2012). Kemenperindag melalui Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik pada Tahun 2012 juga menuliskan bahwa kurangnya koordinasi dan pemahaman dari setiap unit kerja dan kurangnya pemahaman jenis-jenis informasi publik sesuai undang-undang keterbukaan informasi publik menjadi kendala dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di kementerian tersebut. Kemenkes berpendapat bahwa kebutuhan SDM yang handal dan berkompeten dalam melayani informasi publik sangat diperlukan guna mendukung pelayanan keterbukaan informasi publik (Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Kemenkes Tahun 2012).

Untuk memberikan akses informasi publik dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan (STPP Medan) yang merupakan badan publik unit pelaksana teknis vertikal di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian perlu mengelola informasi publik secara akuntabel dan transparan. Pengelolaan informasi publik dimaksudkan untuk meningkatkan layanan informasi publik kepada masyarakat, menciptakan dan menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan.

Pelayanan informasi publik di STPP Medan tidak dipusatkan pada satu unit khusus. Karena belum adanya unit layanan informasi di STPP Medan, pemberian informasi ditangani oleh bagian/ unit yang menangani informasi yang diminta pemohon. Seperti informasi-informasi terkait ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan berada di bagian administrasi umum, informasi-informasi yang terkait dengan akademik dan kemahasiswaan berada dan dikelola di bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan dan juga bagian jurusan

untuk masing-masing program studi yang ada di STPP Medan. Informasi yang terkait dengan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat berada di unit penelitian dan pengabdian masyarakat. Informasi-informasi lain yang terkait dengan penunjang pendidikan berada di unit/ bagian yang ada di STPP Medan. Keberadaan data, dokumen dan informasi-informasi tersebut seolah tersebar dan tidak tersentralisasi sehingga pemohon informasi yang datang harus mendatangi unit/ bagian yang dituju sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkannya. Dalam upaya mendukung pelayanan informasinya, STPP Medan juga telah menyediakan meja *frontdesk* di *lobby* depan kantor STPP Medan. Yang sangat disayangkan adalah personel-personel yang berada di *frontdesk* tersebut bukanlah orang-orang yang berkompeten dalam menangani informasi. Buktinya setiap ada permohonan informasi dari pengunjung yang tidak bisa ditangani, mereka langsung menghubungi atau mengarahkan ke bagian/ unit yang mengerti dan memahami terhadap informasi yang diminta oleh pemohon tersebut. Mekanisme pemberian informasinya pun diserahkan ke bagian/ unit yang mengelola data dan informasi tersebut. Selain pelayanan informasi yang bersifat langsung tersebut, STPP Medan juga melayani permintaan informasi melalui media telepon, *fax*, *email* dan *website* instansi. Mekanismenya pun sama dengan pelayanan informasi yang bersifat langsung dimana permintaan informasi dikoordinasikan dahulu dengan bagian/ unit yang menangani informasi/ data yang diminta oleh pemohon informasi. STPP Medan juga menginformasikan segala sesuatu yang berkaitan tentang profil badan publik sampai dengan pelaksanaan kegiatan yang ada di STPP Medan melalui *website* dengan URL: www.stppmedan.ac.id. Peneliti mengamati bahwa walaupun banyak informasi yang dipublikasikan pada *website* tersebut, informasi-informasi yang mendukung layanan informasi publik itu sendiri banyak yang

belum tersaji seperti informasi yang berhubungan dengan anggaran, daftar informasi publik yang dipublikasikan, standar operasional prosedur, kebijakan-kebijakan internal, dan sebagainya ditambah lagi dengan kondisi websitenya sendiri yang jarang *up to date* terhadap pemberitaan terkini di dalamnya.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 dan peraturan perundang-undangan turunannya, Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 atau yang lebih dikenal dengan Permentan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Permentan tersebut merupakan dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi pertanian, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Kementerian Pertanian dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi. Permentan ini bertujuan untuk mewujudkan komunikasi yang harmonis antara penyedia informasi dengan pemohon dan pengguna informasi pertanian serta pengintegrasian antar penyedia informasi pertanian kepada publik. Pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian berdasarkan Permentan Nomor 32 tahun 2011 adalah berasaskan terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Adapun ruang lingkup pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Permentan Nomor 32 tahun 2011 dimaksud meliputi pengelolaan, pelayanan, kewajiban hak dan pengguna, pembiayaan dan pelaporan informasi publik.

METODE PENELITIAN

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggambarkan alur pemikiran peneliti mengenai fokus penelitian. Suriasumantri 1986, dalam (Sugiyono, 2010)

mengemukakan bahwa seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar bagi argumentasi dalam menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis. Kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi obyek permasalahan.

Pada dasarnya penguraian kerangka pemikiran dalam penulisan tesis ini didasarkan kepada apakah pelayanan informasi publik di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan (STPP Medan) saat ini sudah berjalan dengan efektif sesuai dengan ketentuan Permentan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Untuk teori implementasi yang digunakan, peneliti menggunakan metode implementasi kebijakan George Edwards III. Menurut Edwards ada empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu atau menghambat implementasi kebijakan. Faktor-faktor atau variabel-variabel tersebut adalah komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku dan struktur birokrasi. Menurut Edwards persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personel yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Tentu saja komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengelompokkan data menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara (*interview*) dengan teknik *informan key* kepada narasumber yang menjadi subjek penelitian terkait dengan pelayanan informasi publik di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan. Pemilihan *informan key* didasarkan atas pertimbangan informan-informan tersebut dapat memberikan data dan informasi yang diperlukan, mereka yang menguasai atau memahami permasalahan yang diteliti oleh peneliti, mereka yang masih berkecimpung ataupun terlibat langsung pada pelayanan informasi publik di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan. yang berjumlah 8 orang. Setelah hasil wawancara dari informan-informan tersebut terkumpul, peneliti kemudian menyederhanakannya menjadi sebuah narasi yang akhirnya menjadi kesimpulan terhadap fenomena yang terjadi di lapangan dengan kondisi yang seharusnya diterapkan dalam kajian penelitian ini.

Data sekunder adalah data yang digunakan peneliti untuk mendukung data primer yang telah diperoleh. Adapun teknik yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data sekunder adalah melalui observasi dan dokumentasi.

Pada penelitian ini peneliti akan melakukan observasi dengan cara mengamati langsung, mencatat hal-hal yang diperlukan yang berkaitan dengan proses pelayanan informasi publik di STPP Medan.

Peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan pelayanan informasi publik di STPP Medan seperti: peraturan-peraturan kebijakan terkait, Surat Keputusan terkait penetapan PPID, foto-foto dokumentasi kegiatan pelayanan informasi publik, dan hal lainnya yang berkaitan dengan pendukung data penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID). PPID di Kementerian Pertanian ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Utama) dan PPID Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian sebagai PPID Pelaksana tingkat Eselon I juga telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 5/Kpts/OT.140/J/1/14 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Berdasarkan SK tersebut, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian telah menetapkan PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana sebagai pengelola informasi publik di STPP Medan. Untuk saat ini PPID Pelaksana STPP Medan dijabat oleh Kepala Bagian Administrasi Umum STPP Medan, dan PPID Pembantu Pelaksana dijabat oleh Kepala Unit Sarana Pendidikan STPP Medan.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara di lapangan, tugas dan fungsi PPID di STPP Medan sudah berjalan. Hal ini dilihat dari koordinasi yang dilakukan oleh PPID Pelaksana yang dijabat langsung oleh Kepala Bagian Administrasi Umum dalam mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan informasi publik di lingkungan STPP Medan. Bentuknya pun mulai dari penataan arsip/dokumen sampai dengan penyimpanan arsip/dokumen pada lemari-lemari yang telah diklasifikasikan. Yang sangat disayangkan adalah keberadaan PPID Pembantu Pelaksana di STPP Medan yang seharusnya menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik malah dikerjakan oleh staf dan pengelola yang

ada di bagian administrasi umum. Tidak terjalannya koordinasi dan komunikasi yang baik antara PPID pembantu pelaksana dengan PPID pelaksana di STPP Medan terhadap penyediaan bahan informasi membuat PPID pembantu pelaksana tersebut seakan tidak berfungsi sama sekali. Ditambah lagi dengan tidak adanya kebijakan internal dari STPP Medan itu sendiri terhadap kewajiban dan tanggungjawab yang diemban PPID di STPP Medan membuat PPID pembantu pelaksana seakan diam ditempat. Untuk pengelolaannya sendiri, PPID pelaksana lebih banyak berkoordinasi dengan staf dan pengelola yang ada di bagian administrasi umum dan bagian/unit-unit yang ada di STPP Medan dalam hal penyediaan data/ bahan informasi. Kurangnya pengetahuan dan sosialisasi terhadap PPID di STPP Medan, membuat pelayanan informasi publik di STPP Medan belum berjalan dengan efektif. Peneliti beranggapan dikarenakan belum tersedianya unit khusus yang berfungsi sebagai tempat layanan informasi publik di STPP Medan, membuat pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh PPID diemban oleh personil lain yang tupoksinya notabene juga melakukan pelayanan publik di STPP Medan.

Hasil yang dapat disimpulkan peneliti melalui hasil wawancara dengan beberapa *informan key* terkait dengan pengelolaan informasi publik di STPP Medan adalah bahwa keberadaan PPID sebagai pengelola informasi publik di STPP Medan kurang begitu menonjol. Yang menjadi kendala adalah kurangnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran dari personil PPID itu sendiri khususnya PPID pembantu pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyedia bahan-bahan informasi publik di STPP Medan. Di samping itu, keterbatasan SDM yang memiliki kualitas dan kompetensi di bidang pelayanan informasi publik juga mempengaruhi dalam proses pelayanan informasi publik di STPP Medan. Hal ini dilihat dari penanganan pelayanan informasi

dilakukan oleh masing-masing personil yang berada pada bagian/ unit di STPP Medan.

STPP Medan memiliki banyak informasi berupa data, dokumen, file dan informasi-informasi lainnya yang tersebar di masing-masing bagian/ unit yang ada di STPP Medan. Informasi-informasi yang dimaksud dalam Permentan Nomor 32 tahun 2011 sebahagian besar sudah dikumpulkan di bagian administrasi umum. Belum adanya aturan yang jelas terhadap daftar informasi publik di STPP Medan membuat unsur pelaksana belum mengetahui apa yang harus dipersiapkan dan disajikan dalam mendukung pelayanan informasi publik. Termasuk dalam pengelolaan website, kurangnya komunikasi dan koordinasi antara pengelola website dan bagian/ unit yang ada di STPP Medan membuat pemuktahiran data dan berita pada website jarang terupdate.

Diterbitkannya Permentan Nomor 32 Tahun 2011 dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada pelayan informasi dalam mengelola dan melayani informasi publik di lingkungan instansinya masing-masing dengan mengacu kepada standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan di dalam Permentan tersebut. Wujud pelayanan informasi yang dimaksudkan dalam Permentan tersebut adalah tersedianya unit layanan informasi baik berupa *desk/counter* layanan informasi, ruangan pelayanan informasi, pojok/ stand/ bagian layanan informasi yang dikelola oleh personil-personil yang memang memiliki kompetensi dalam penanganan pelayanan informasi publik. Kondisi di STPP Medan memperlihatkan bahwa walaupun pelayanan informasi sudah berjalan tetapi mekanisme pelayanannya belum mengacu kepada apa yang dimaksud dalam Permentan Nomor 32 Tahun 2011 tersebut. Hal tersebut terlihat dari belum adanya instrumen-instrumen yang dibuat dalam hal penanganan pelayanan permintaan informasi publik seperti belum tersedianya SOP dalam pelayanan informasi, belum tersedianya unit khusus yang mengelola

pelayanan informasi publik, dan belum tersedianya daftar informasi publik agar publik mengetahui informasi-informasi apa saja yang dapat diperolehnya. Pelayanan informasi di STPP Medan selama ini langsung ditangani oleh bagian/ unit yang menguasai terhadap informasi yang dibutuhkan oleh pemohon tersebut. Memang terdapat *desk counter* yang berada di bagian depan lobby kantor STPP Medan tetapi meja tersebut bukanlah sebagai unit pelayanan informasi publik. Meja tersebut lebih cenderung ke pelayanan terhadap tamu/ pengunjung yang datang dan mengarahkannya ke unit/ bagian yang akan dikunjunginya.

Sentralisasi pengelolaan dan pelayanan informasi saat ini berada di Bagian Administrasi Umum (BAU), karena di tempat inilah segala informasi umum yang terkait dengan program dan kegiatan di STPP Medan dikumpulkan.

Hasil yang dapat disimpulkan peneliti terkait dengan pelayanan informasi di STPP Medan adalah pelayanan informasi yang berjalan di STPP Medan belum berjalan efektif dari segi pelayanannya. Belum adanya standar operasional prosedur yang jelas dalam pelayanan informasinya membuat pengunjung langsung saja meminta informasi ke bagian yang diinginkannya tanpa harus melalui prosedur pelayanan birokrasi. Belum tersedianya unit layanan informasi membuat pelayanan informasi tersebar di masing-masing bagian/ unit di STPP Medan. Kurangnya pemahaman dan sosialisasi baik pimpinan, unsur pengelola dan PPID itu sendiri menjadi penyebab kurang efektifnya penyelenggaraan pelayanan informasi di STPP Medan.

Dalam pelayanan informasinya, STPP Medan selalu mengkomunikasikan peruntukkan informasi yang diminta dengan pihak pemohon sebagai pengguna informasi. Dan tak jarang memang pemohon-pemohon informasi tersebut menyertakan tujuan penggunaan informasi yang diinginkan dalam surat permohonannya, seperti sebagai bahan

evaluasi, bahan untuk rapat kerja (biasanya yang diminta oleh pusat) sampai dengan untuk bahan penelitian bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian di STPP Medan. Tentunya melalui prosedur persetujuan dari pimpinan, para pengguna informasi tersebut sudah dapat mengambil data/ informasi yang dibutuhkan di STPP Medan.

Pelayanan informasi publik di STPP Medan yang mengakibatkan pengeluaran biaya dibebankan kepada pemohon informasi. Biaya yang dimaksud adalah biaya untuk penggandaan berkas, dokumen, ataupun buku-buku yang tersedia di perpustakaan STPP Medan yang telah didapat oleh pemohon informasi. STPP Medan sendiri tidak ada menetapkan standar biaya untuk penggandaan-penggandaan berkas, dokumen, buku-buku tersebut. Untuk mempermudah akses terhadap penggandaan-penggandaan berkas, dokumen, buku-buku tersebut, koperasi STPP Medan yang berada di lingkungan kampus STPP Medan memberikan fasilitas fotokopi, penjualan ATK, dll guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan pengunjung dan sivitas akademika di STPP Medan.

Dalam hal kegiatan pelaporan pelayanan informasi publik, PPID di STPP Medan membuat laporan tahunan terhadap penyelenggaraan pelayanan informasi publik di STPP Medan dan dikirimkan ke PPID Pelaksana tingkat Eselon I yang ada di pusat. Format laporan yang dikirimkan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Permentan Nomor 32 Tahun 2011 dan juga bentuk form yang dibuat oleh PPID Pelaksana tingkat Eselon I pusat yaitu Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian.

Menurut Edwards (1980), persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personel yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-

perintah itu dapat diikuti. Tentu saja, komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Akan tetapi, banyak hambatan-hambatan yang menghadang transmisi komunikasi-komunikasi pelaksanaan dan hambatan-hambatan ini mungkin menghalangi pelaksanaan kebijakan.

Jika kebijakan-kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan juga petunjuk-petunjuk itu harus jelas. Jika petunjuk-petunjuk pelaksanaan itu tidak jelas, maka para pelaksana (*implementor*) akan mengalami kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan. Selain itu, mereka juga akan mempunyai keleluasaan untuk memaksakan pandangan-pandangan mereka sendiri pada implemementasi kebijakan, pandangan-pandangan yang mungkin berbeda dengan pandangan-pandangan atasan mereka atau pandangan-pandangan yang seharusnya menjadi acuan.

Menurut Edwards, ada empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Faktor-faktor atau variabel-variabel tersebut adalah komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan, atau tingkah laku-tingkah laku dan struktur birokrasi.

Menurut Edward III dalam Widodo (2010 :97), komunikasi diartikan sebagai "proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan". Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*transmission*),

kejelasan (clarity) dan konsistensi (consistency).

Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (implementors) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Hal ini tidak selalu merupakan proses yang langsung sebagaimana dampaknya. Banyak sekali ditemukan keputusan-keputusan tersebut diabaikan atau jika tidak demikian, seringkali terjadi kesalahpahaman terhadap keputusan-keputusan yang dikeluarkan. Yang terpenting adalah bagaimana kesiapan seorang pemangku kebijakan mengetahui dan memahami kebijakan yang telah dibuat oleh pusat dan mentransformasikannya ke dalam berbagai bentuk implementasi dan standar-standar operasional prosedur yang jelas sehingga para pelaksana dapat melaksanakan tugasnya sebagai implementor dari kebijakan yang telah dikeluarkan. Kepahaman terhadap konteks peraturan sebuah kebijakan menjadi sangat penting untuk terselenggaranya program.

Dimensi kejelasan menghendaki jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Sering kali instruksi-instruksi yang diteruskan kepada pelaksana-pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal.

Dimensi ketiga yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah konsistensi. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Di sisi yang lain, perintah-perintah implelementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan. Bila hal ini terjadi, maka akan berakibat pada ketidakefektifan implementasi kebijakan karena tindakan yang sangat longgar besar kemungkinan tidak dapat digunakan untuk melaksanakan tujuan-tujuan kebijakan.

Berdasarkan pemaparan di atas dan melihat hasil-hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa faktor komunikasi baik dari segi transmisi, kejelasan dan konsistensi dalam pelayanan informasi di STPP Medan belum berjalan dengan efektif. Peneliti menyimpulkan bahwa baik dari unsur pimpinan sampai unsur pelaksana/ pengelola masih banyak yang belum tahu dan memahami akan ketentuan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan Permentan Nomor 32 Tahun 2011, sehingga implementasi permentan yang telah dikeluarkan tersebut seolah menjadi terabaikan. Menurut peneliti hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan terhadap Permentan Nomor 32 tahun 2011 baik dari level pusat ke UPT daerah maupun sebaliknya sehingga pelaksanaannya pun belum berjalan dengan efektif. Walaupun beberapa tahapan pelaksanaan sudah berjalan, tetapi kondisi maksimal masih belum memenuhi apa yang dimaksud pada ketentuan permentan tersebut. Faktor kejelasan dalam komunikasi sangatlah

berpengaruh sekali. Instrumen-instrumen yang sudah ditetapkan pada pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai Permentan 32 Tahun 2011 sudahlah sangat jelas. Peneliti berpendapat bahwa petunjuk-petunjuk operasional untuk pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan Permentan Nomor 32 Tahun 2011 tidak dipahami oleh PPID STPP Medan. Buktinya antara PPID itu sendiri tidak terjalin koordinasi dan komunikasi yang baik terhadap tugas dan fungsinya masing-masing. PPID pelaksana yang juga menjabat kepala bagian sudah barang tentu aktif dalam mengkoordinasikan setiap kegiatan-kegiatan di STPP Medan. Sementara PPID pembantu pelaksana yang pasif dalam tupoksi dianggap tidak paham akan posisinya sebagai penyedia bahan informasi di STPP Medan. Peneliti juga menilai bahwa STPP Medan masih belum konsisten dalam hal pelayanan informasi publiknya. Hal ini terlihat dari informasi yang disajikan baik pada papan informasi/pengumuman, website dan informasi-informasi yang ada di masing-masing bagian/unit di STPP Medan masih bersifat informasi-informasi yang sudah usang. Bahkan ada informasi-informasi tersebut yang tidak diganti sudah berbulan-bulan bahkan setahun. Di samping itu konsistensi dalam hal pelayanan informasi juga tidak begitu menonjol. Hal tersebut terlihat dari belum tersedianya petunjuk-petunjuk maupun standar operasional prosedur pelayanan informasi yang memudahkan pemohon informasi untuk mendapatkan informasi yang diinginkannya.

Sumber-sumber kebijakan sangat penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Tanpa sumber-sumber, kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan di atas kertas mungkin hanya akan menjadi rencana saja dan tidak pernah ada realisasinya. Sumber-sumber yang akan mendukung kebijakan yang efektif terdiri dari jumlah staf yang mempunyai keterampilan yang memadai serta dengan jumlah yang cukup, kewenangan, informasi dan fasilitas. Akibat yang

ditimbulkan dari kekurangan personel adalah ketidakefektifan dalam melaksanakan suatu kebijakan-kebijakan secara langsung. Jelasnya semakin teknis kebijakan yang dilaksanakan dan semakin besar keahlian yang dibutuhkan dari para pelaksana, maka semakin besar pula kekurangan personel yang mempunyai keterampilan yang memadai dan hal ini akan menghambat pelaksanaan kebijakan. Kekurangan staf yang terampil merupakan masalah utama dalam program-program baru yang membutuhkan keahlian, di samping juga jumlah personel yang mempunyai pengalaman sangat sedikit. Dan dalam keadaan tertentu personel dengan keterampilan yang dibutuhkan tidaklah selalu ada.

Sumber krusial kedua dalam implementasi kebijakan adalah informasi. Jika kebijakan-kebijakan bersifat inovatif dan sangat teknis, maka kesulitan terbesar yang dihadapi adalah mendapatkan seseorang yang mengetahui bagaimana melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut dengan baik. Sementara itu, konsekuensi-konsekuensi dari banyak tindakan hanya dapat diduga karena kurangnya pengetahuan tentang hubungan-hubungan anatar perilaku implementasi dan hasil-hasil kebijakan. Karena kurangnya informasi, beberapa kebijakan tidak pernah dilaksanakan. Kebijakan-kebijakan lain dilaksanakan atas dasar ujicoba sejalan dengan pemahaman tentang bagaimana mengimplementasikan kebijakan dengan secara perlahan-lahan menggunakan proses implementasi dan tanggapan-tanggapan dari mereka yang terlibat.

Wewenang merupakan sumber lain yang penting bagi implementasi kebijakan. Wewenang ada dalam banyak bentuk, dari memberi bantuan sampai memaksakan perilaku. Wewenang yang memadai sering kali langka terutama dalam hal mengatur personel-personel lain. Kadang-kadang wewenang itu tidak ada bahkan diatas kertas sekalipun. Pada saat yang lain, para pelaksana

mempunyai wewenang formal, tetapi dibatasi dalam penggunaannya.

Faktor yang tidak kalah pentingnya bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah fasilitas. Penyediaan fasilitas pendukung yang optimal sangatlah diperlukan guna berjalannya dengan efektif implementasi dari kebijakan tersebut. Tentunya penyediaan fasilitas seperti sarana dan prasarana disesuaikan dengan apa yang memang benar-benar dibutuhkan publik dalam hal peningkatan pelayanan.

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti menyimpulkan bahwa faktor sumber-sumber dalam mengimplementasi Permentan Nomor 32 Tahun 2011 terkait pelayanan informasi di STPP Medan sangatlah berpengaruh. Kurangnya personil yang kompeten dalam menangani pelayanan informasi menyebabkan pelayanan informasi belum berjalan dengan efektif. Walaupun beberapa fasilitas pendukung dalam pelayanan informasi sudah tersedia, tetapi pengetahuan atau informasi tentang bagaimana mekanisme pelayanan informasi sesuai permentan tersebut masih belum diketahui oleh pengelola yang ada di STPP Medan. Seperti bagaimana melayani permintaan informasi, mendatanya sampai dengan mendistribusikan informasi tersebut kepada yang membutuhkannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Belum tersedianya unit khusus pelayanan informasi menyebabkan pelayanan informasi menyebar dan dikelola masing-masing bagian/ unit. Mekanisme pelayanan informasi dimaksudkan agar informasi-informasi yang diberikan mempunyai legalitas, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Banyaknya berita-berita hoax yang bermunculan di berbagai media-media saat ini dikarenakan sumber informasi yang tidak jelas asal usulnya, sehingga orang pun bebas menginterpretasikan makna dari informasi yang diterimanya tanpa ada batasan yang terkait dengan itu.

Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, tingkah laku-tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit. Menurut Edwards (1980), banyak kebijakan masuk ke dalam zona ketidakacuhan. Ada kebijakan yang dilaksanakan secara efektif karena mendapat dukungan dari para pelaksana kebijakan, namun kebijakan-kebijakan lain mungkin akan bertentangan secara langsung dengan pandangan-pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari para pelaksana. Jika orang diminta untuk melaksanakan perintah-perintah yang tidak mereka setujui, maka kesalahan-kesalahan yang tidak dapat dielakkan terjadi, yakni antara keputusan-keputusan kebijakan dan pencapaian kebijakan. Menurut Edwards (1980), salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif-insentif. Oleh karena pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif-insentif oleh para pembentuk kebijakan tingkat tinggi besar kemungkinan mempengaruhi tindakan-tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan-keuntungan atau biaya-biaya tertentu barangkali akan menjadi faktor pendorong yang membuat para implementor melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan-kepentingan pribadi, organisasi atau kebijakan substantif.

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti menyimpulkan bahwa sebenarnya tidak

menjadi masalah bagi pengelola yang ada di STPP Medan untuk melaksanakan mekanisme pelayanan informasi sesuai dengan ketentuan permentan, yang menjadi kendala adalah bahwa informasi dan kejelasan untuk itu tidak dipublikasikan. Sehingga memunculkan penafsiran bahwa pelayanan informasi sama halnya dengan pelayanan publik. Sikap pemangku kebijakan di sini pun bukan berarti tidak menerapkan tetapi tidak tahu bahwa kebijakan tersebut memang sudah seharusnya diterapkan. Kurangnya informasi dan sosialisasi dari pusat ke daerah mungkin menjadi salah satu penyebab kenapa implementasi kebijakan belum berjalan. Sikap-sikap pengelola yang menganggap hal tersebut kurang menjadi prioritas atau bahkan merasa sudah dilaksanakan menjadikan pelayanan informasi di STPP Medan belum berjalan dengan efektif.

Pada dasarnya, para pelaksana kebijakan mungkin mengetahui apa yang dilakukan dan mempunyai cukup keinginan serta sumber-sumber untuk melakukannya, tetapi dalam pelaksanaannya mereka mungkin masih dihambat oleh struktur birokrasi di mana mereka menjalankan kegiatan tersebut. Menurut Edwards (1980), salah satu karakteristik utama birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut sebagai *Standard Operating Procedures* (SOP). Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu, SOP juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas, yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan-peraturan. Kurangnya sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan dengan semestinya membantu dalam menjelaskan penggunaan SOP yang berulang-ulang. Para pelaksana jarang mempunyai kemampuan untuk menyelidiki dengan seksama dan secara individual setiap keadaan yang mereka

hadapi. Sebaliknya mereka mengandalkan pada prosedur-prosedur biasa yang menyederhanakan pembuatan keputusan dan menyesuaikan tanggung jawab program dengan sumber-sumber yang ada. Sekali prosedur-prosedur biasa ditetapkan, maka akan cenderung tetap berlaku. Namun demikian, prosedur-prosedur biasa yang dirumuskan pada masa lalu mungkin dimaksudkan untuk menyelesaikan keadaan-keadaan khusus yang berbeda dengan keadaan sekarang sehingga justru akan menghambat perubahan dalam kebijakan karena prosedur-prosedur biasa itu tidak sesuai dengan keadaan-keadaan baru atau program-program baru. Kelemahan ini akan tampak selama krisis bila nuansa-nuansa dalam kebijakan mungkin secara khusus penting dan SOP mungkin tidak sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang lebih rutin. Kebanyakan organisasi sering mempunyai kesulitan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi.

Dari penjelasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa belum tersedianya standar operasional prosedur tentang pelayanan informasi membuat pengelolaan dan pelayanan informasi di STPP Medan belum berjalan dengan efektif. Walaupun bentuk pelayanan sudah dijalankan selama ini, tetapi masih banyak yang belum mengetahui apa maksud tujuan dari dibuatnya ketentuan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi. Dengan adanya standar yang telah dibakukan dalam bentuk permentan tersebut tentunya pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian diharapkan dapat mewujudkan komunikasi yang harmonis antara penyedia informasi dengan pemohon dan pengguna informasi pertanian serta pengintegrasian antar penyedia informasi pertanian kepada publik.

SIMPULAN

Implementasi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 32 Tahun 2011

tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian pada Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan belum berjalan dengan efektif.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan (STPP Medan) kurang berfungsi dengan maksimal dikarenakan kurangnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran dari personil PPID itu sendiri tentang Permentan Nomor 32 Tahun 2011 khususnya PPID pembantu pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyedia bahan-bahan informasi publik di STPP Medan.

Dari segi pelayanan informasi, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan (STPP Medan) belum memiliki unit khusus yang menangani pelayanan informasi publik, belum tersedianya standar operasional prosedur (SOP) terkait mekanisme pelayanan informasi, keterbatasan personil yang memiliki kualitas dan kompetensi dalam hal penanganan informasi, menyebabkan pelayanan informasi dikelola oleh masing-masing bagian/ unit yang ada di STPP Medan.

Informasi-informasi yang disajikan baik melalui papan informasi/ pengumuman maupun website instansi masih kurang, ditambah lagi belum tersedianya daftar informasi publik membuat pelayanan informasi di STPP Medan belum berjalan dengan efektif.

Faktor komunikasi dan koordinasi dalam bentuk transmisi, kejelasan dan konsistensi, sumber-sumber seperti fasilitas dan SDM, kecenderungan-kecenderungan seperti pola lama yang menjadi kebiasaan dalam melakukan pelayanan, dan belum tersedianya perangkat standar operasional prosedur (SOP) pada struktur birokrasi dalam memberikan pelayanan informasi menjadi faktor kendala dalam mengimplementasikan Permentan Nomor 32 Tahun 2011 tersebut terkait dengan pelayanan informasi publik di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan.

Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi pertanian, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Pertanian dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi yang bertujuan untuk mewujudkan komunikasi yang harmonis antara penyedia informasi dengan pemohon dan pengguna informasi pertanian serta mewujudkan pengintegrasian antar penyedia informasi pertanian kepada publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabet.
- Anggara, S., 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Creswell, J.W. 2010. *Research Design Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, W.N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Easton, D. 1965. *A System Analysis of Political Life*. New York: Wi-Ley.
- Hutahaean, M. 2008. *Pengantar Studi Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Sutra.
- Jones, C.O, 1984. *An Introduction to the Study of Public Policy*. Third Edition. Monterey:Books/Cole Publishing Company.
- LAN & BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Penerbit LAN.
- Grindle, M.S., 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton. New Jersey: Princetoon University Press.
- Moleong, Lexi. J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2014. *Kebijakan Publik Formulasi, Impelementasi dan Formulasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin, 1982. *Bureaucracy and Policy Implementation*. Homewood, Illinois: The Dorsey Press.
- Eyestone, R, 1971. *The Threads of Policy: A Study in Policy Leadership*. Indianapolis: Bobbs-Merril.

- Santoso, A. 1993. Analisis Kebijaksanaan Publik: Suatu Pengantar. *Jurnal Ilmu Politik* 3. Jakarta: Gramedia.
- Sendjaja, S.D. 2013. Pengantar Ilmu Komunikasi. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Sitorus, M. 2013. Teori Kebijakan Publik Formulasi, Impelementasi dan Formulasi. Bandung: Unpad Press.
- Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: Alfabeta
- _____. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryana, A. 2011. Pengaruh Lingkungan Sosial terhadap Efektifitas Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran. Bandung.
- Dye, T.R., 1975. *Understanding Public Policy*. Second Edition. Englewood Cliff, N.J: Prentice-Hall.
- Parsons, W., 2011. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Alih Bahasa Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Widjaja, A.W. 2008. *Komunikasi: Komunikasi & Hubungan Masyarakat*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Winarno, B. 2007. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- _____. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi, Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Peraturan Perundangan:
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/Kpts/HK.060 /1/2013 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian.
- Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008.
- Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 /Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik